

Pancasila Sebagai Ideologi yang Dinamis Perspektif Bung Hatta

**Aulia Shifa Alshafiera*,
Akvina Putri Fauziah
Mohammad Faizin**

Program Studi Sarjana Pendidikan
Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan, Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Surabaya, Indonesia.

Korespondensi :
06020525031@student.uinsa.ac.id

Masuk : 19 November 2025
Revisi : 2 Desember 2025
Diterima : 14 Desember 2025
Diterbitkan : 27 Desember 2025

Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Pembumian
Pancasila



Artikel ini berlisensi [Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Pancasila sebagai ideologi dinamis dalam perspektif pemikiran Mohammad Hatta. Pancasila tidak dipandang hanya sebagai dokumen kaku, melainkan sebagai nilai hidup yang berkembang dan adaptif terhadap tantangan zaman dan perubahan sosial yang cepat. Biografi Hatta menunjukkan perannya sebagai proklamator dan negarawan yang berwatak jujur dan disiplin, yang secara aktif berkontribusi dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945, menekankan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup. Sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila memiliki tiga tingkatan yaitu Nilai Dasar yang bersifat tetap (Ketuhanan hingga Keadilan Sosial), Nilai Instrumental (UUD 1945), dan Nilai Praksis (pelaksanaan nyata). Hatta meyakini Pancasila bertumpu pada dua fondasi: fondasi moral (sila 1) dan fondasi politik (sila 2-5). Fondasi moral ini memastikan negara memiliki dasar yang kokoh untuk mengarah pada keadilan dan kebenaran. Pada akhirnya, Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dengan melindungi seluruh tumpah darah dan mengatasi segala paham golongan. Keterbukaan Pancasila memungkinkan Indonesia mempertahankan nilai luhur, terbuka terhadap transformasi konstruktif, dan menjadi instrumen penting dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menciptakan keadilan sosial di tengah dinamika kehidupan modern.

Kata Kunci: Pancasila, Bung Hatta, Ideologi, Dinamis

Cara Mengutip

Shifa Alshafiera, A., Fauziah, A. P., & Faizin, M. (2025). PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI YANG DINAMIS PERSPEKTIF BUNG HATTA. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 5(2): 90-99. Tautan: <https://jurnalpembumianpancasila.id/index.php/jpp/article/view/69> DOI : <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i2.69>

Pendahuluan

Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis (*Philosophische Grondslag*), dan pegangan hidup (*Weltanschauung*) bagi negara Indonesia, secara fundamental ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Dalam konteks kenegaraan, Pancasila wajib dilihat sebagai norma dasar (*Grundnorm/Staats Fundamental Norm*) yang menjadi sumber utama dari semua aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (Fuady, 2019). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu diuraikan menjadi ideologi yang bersifat terbuka agar prinsip-prinsip operasionalnya dapat terwujud. Pancasila mencerminkan karakter yang dinamis dan tidak akan kehilangan relevansinya (membeku) sehingga Pancasila menjadi lebih efisien dan membuktikan fungsinya demi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai kendala dan rintangan di era globalisasi (Soeprapto, 2013).

Menguatkan edukasi dan wawasan publik terhadap nilai-nilai Pancasila yang valid dan murni menjadi langkah penting dalam memecahkan berbagai masalah yang menjadi ancaman pancasila dan bangsa Indonesia. Pemahaman yang benar harus mengacu pada tokoh perumus Pancasila dan sekaligus pendiri Bangsa Indonesia.¹ Sudah jelas bahwa pemikiran Hatta tentang demokrasi berkaitan dengan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Hatta menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar demokrasi Indonesia. Menurut Bung Hatta, prinsip-prinsip pancasila berasal dari nilai-nilai asli orang Indonesia. Beliau berpendapat bahwa kebenaran, kebaikan, kejujuran, keindahan, dan kesucian adalah prinsip dasar dari pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak sekadar merupakan peninggalan sejarah, melainkan juga sebagai sumber inspirasi untuk membangun karakter bangsa baik sekarang maupun di masa depan (Zubadi, 2020).

Studi ini bertujuan untuk mengkaji gagasan salah satu tokoh bangsa dan negarawan Indonesia, yakni Bung Hatta. Fokus utama penelitian ini adalah konsep Bung Hatta mengenai Pancasila sebagai Ideologi yang Dinamis. Pemikiran Bung Hatta dipilih dalam riset ini sebab beliau diakui sebagai tokoh pemikir dan pelaku sejarah yang paling teguh dan konsisten (Fuady, 2019).

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan kajian literatur. Metode kajian literatur merupakan kajian yang berarti Penghimpunan data kepustakaan, dilanjutkan dengan kegiatan telaah (membaca), perekaman (mencatat) serta mengolah data penelitian. Kajian literatur ini bertujuan untuk menghimpun, mengkaji, dan menggabungkan berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode ini mencakup penelusuran beragam sumber literatur, seperti buku, artikel, laporan dan lain-lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang terperinci tentang topik yang sedang diteliti (ujang jamaludi, reksa adya pribadi, 2023).

Pembahasan

Biografi Bung Hatta

Bung Hatta merupakan wakil presiden pertama di Indonesia pada tahun 1945 yang menjadi seorang pemimpin yang sifat kredibel dan taat. Beliau lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Haji Mohammad Djamil, seorang guru mursyid (tarekat atau persaudaraan sufi) yang merupakan ayahanda Bung Hatta. di Sumatra Barat. Ibunda Bung Hatta adalah Siti Saleha, yang merupakan Ibu Rumah Tangga dan ia talenta dalam mengajar agama dan mendidik anak-anaknya. Bung

hatta memiliki enam saudara perempuan, ia merupakan anak bungsu dan anak laki-laki tunggal di keluarga (Alfarizi, 2020).

Bung Hatta menempuh pendidikan pertama di *Europeesche Lagere School* (ELS - sekolah dasar untuk berpenduduk mayoritas kulit putih) di Padang pada tahun 1913, kemudian pada tahun 1917 Bung Hatta menempuh pendidikan menengah di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Padang. Bung Hatta setelah menempuh pendidikan menengah pada tahun 1919 beliau bermigrasi ke kota Batavia (yang Sekarang sebutan Jakarta) beliau melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Dagang yang bernama "*Prins Hendrik School*" dan beliau lulus pada tahun 1921 (Heri santoso, 2019). Usai meraih predikat sangat baik di Sekolah Tinggi Dagang, Bung Hatta melanjutkan pendidikannya di Rotterdam, Belanda, dengan mengambil studi ekonomi di *Nederland Handelshogeschool* (kini Universitas Erasmus). Untuk studi tersebut, dia tinggal di Belanda selama sebelas tahun. Beliau telah aktif dalam organisasi dan membaca banyak buku dan koran tentang masalah sosial dan politik Sejak masa mudanya, tepat saat beliau berumur 15 tahun. Dengan demikian Bung Hatta mengenal banyak pemikiran orang seperti Agus Salim dan Tjokroaminoto. Ketika Bung Hatta mulai kuliah Pada tahun 1921, ketika berada di Belanda, ia turut aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Salah satu organisasi yang diikutinya adalah *Indische Vereeniging*, yaitu perkumpulan para pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. Setahun kemudian, tepatnya pada 1922, organisasi tersebut mengubah namanya menjadi *Indonesische Vereeniging* dan menyatakan sikap menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Selang satu tahun setelah itu, nama organisasi tersebut kembali diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Lalu Hatta kemudian dikenal luas di kalangan kaum intelektual Indonesia sebagai tokoh proklamator, negarawan, serta pejuang demokrasi politik dan ekonomi bangsa.

Bung Hatta terlibat secara aktif dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 dan memberi kontribusi pemikirannya dalam proses pembentukan Pancasila dan konstitusi Indonesia. Menurut Hatta (1981:12), Hatta berpartisipasi secara aktif dalam proses penyempurnaan gagasan Pancasila, termasuk menentukan urutan hirarkis sila-sila yang tercantum dalam rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan secara sistematis. Adapun rumusan Pancasila yang disepakati pada tahap akhir sidang BPUPKI adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan dan permusyawaratan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seusai rumusan tersebut disetujui dalam sidang BPUPKI, Bung Hatta dan anggota lainnya terus bekerja untuk memperbaiki dan menjelaskan makna setiap sila sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang kuat bagi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Bunda Hatta menekankan bahwa Pancasila harus menjadi lebih dari sekedar kumpulan prinsip moral; itu harus menjadi dasar yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Landasan Teori dan Konsep Pancasila secara umum

Pancasila disebut ideologi bangsa yang dinamis namun secara bahasa Yunani, makna Ideologi itu sendiri diturunkan dari istilah *idea* yang berarti sebuah pemikiran, prinsip dan pengetahuan dasar, lalu *logos*, yang diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan (Ananda Rivaldo Pondiu Unggul, Dewanda Tisna Ajati & Fitriyono, 2022). Secara pengertian ideologi merupakan suatu gagasan, ide atau konsep dasar yang menjadi pegangan dalam pedoman hidup bangsa. Ideologi menjadi landasan dalam menentukan arah dan kebijakan suatu negara, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik (Irawan et al., 2023).

Pancasila memegang peranan esensial bagi rakyat dan negara Indonesia, yang bertindak sebagai landasan ideologi, cara pandang hidup, semangat (jiwa), kepribadian, dan sumber hukum. Negara Pancasila memiliki beberapa fungsi, seperti Pancasila memegang peranan sentral sebagai kaidah fundamental bagi seluruh sumber hukum di Indonesia, sekaligus menjadi landasan spiritual bagi tata tertib hukum nasional. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Pancasila bertindak sebagai spirit (suasana batin) yang meresapi Undang-Undang Dasar, menetapkan idealisme hukum (cita-cita hukum) yang ingin dicapai, serta berfungsi sebagai sumber motivasi dan energi (semangat) utama bagi UUD 1945.

Peran ini dapat dibandingkan dengan fungsinya sebagai pedoman hidup bangsa. Dalam kapasitasnya sebagai pedoman hidup atau perspektif, Pancasila menyediakan serangkaian nilai luhur yang difungsikan sebagai kompas moral dan pedoman dalam aktivitas keseharian. Konsekuensinya, setiap perilaku dan kebijakan, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh para penyelenggara negara, harus senantiasa berpedoman dan selaras dengan nilai-nilai esensial Pancasila.

Selain Pancasila sebagai ideologi, makna dari kata dinamis adalah sifat yang terbuka menjadi inspiratif dan fleksibel yang mampu bergerak, mampu beradaptasi dengan perubahan atau mengikuti perkembangan zaman. Apabila Pancasila tidak difungsikan sebagai panduan hidup, masyarakat rentan terdorong untuk bertindak diluar norma, terutama yang bertentangan dengan tatanan aturan kemasyarakatan. Hal inilah yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, sebab ia telah ditetapkan menjadi prinsip fundamental (nasional) Indonesia serta menjadi falsafah hidup bangsa.

Pancasila memiliki sifat yang terbuka, fleksibel tetap mempertahankan jati diri dan nilai-nilai utama, meskipun negara sudah terus berkembang tetapi Pancasila juga mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Inilah yang menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Pancasila memiliki nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara (Teuku Muharam Rizqullah, 2022). Nilai-nilai tersebut tidak sekadar memiliki karakter norma, melainkan juga memiliki daya hidup kuat sehingga mampu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebagai ideologi yang dinamis, Pancasila memuat nilai-nilai yang mendasari antara hubungan sosial, politik, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia (Savitri & Dewi, 2021). Nilai-nilai kehidupan yang termuat dalam Pancasila mencerminkan sifatnya sebagai ideologi yang bersifat dinamis diantaranya:

Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan diambil dari Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama di Pancasila, menurut makna nilai ketuhanan memiliki makna nilai yang terkandung kita sebagai manusia menganut agama dan kepercayaan yang harus dilindungi dan dihargai serta kita diciptakan oleh Tuhan dan wajib menjalankan perintahnya serta menjauhi segala perbuatan larangan-Nya (Jedra Sudirman, 2021). Pada sila ini kita diajarkan untuk toleransi antar umat agama dan taat kepada Tuhan.

Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan diambil dari Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai kedua dari Pancasila. Menurut nilai kemanusiaan memiliki makna nilai yang terkandung bahwa kita sebagai manusia mempunyai hidup saling bertoleransi, rasa kemanusiaan dan menumbuhkan rasa saling menghargai antar sesama manusia (Awalia Marwah Suhandi, 2021). Pada sila ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama manusia dengan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama, tanpa melihat perbedaan agama, ras, suku, atau budaya.

Nilai Persatuan

Nilai persatuan diambil dari Persatuan Indonesia adalah nilai ketiga dari Pancasila. Dalam nilai persatuan mengandung makna yang terkandung yakni Indonesia itu tidak bisa terpecahkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak pulau sehingga jutaan manusia tinggal dan hidup di sana. Jika persatuan tidak relevan untuk kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada perdamaian dalam Indonesia. Maka dari itu, kita dalam kehidupan bangsa perlu dikembangkan rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta semangat bhineka tunggal ika. Menerapkan rasa nilai persatuan kita perlu menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan antara suku, ras, dan budaya (Fitri Lintang Sari, 2022).

Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan diambil dari Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah nilai keempat dari Pancasila”. Dalam nilai kerakyatan ini memiliki makna yang terkandung bahwa Indonesia itu tidak bisa terpecahkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki rasa sifat musyawarah dengan adanya kebersamaan atau kerja sama dalam mengambil suatu keputusan demi mencapai mufakat persetujuan bersama. Proses permusyawaratan / perwakilan menunjukkan pentingnya mendiskusikan, mendengarkan berbagai pendapat, dan mencari solusi terbaik secara bersama demi kepentingan banyak rakyat. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan yang diwakili dalam pengambilan keputusan (Osbin Samosir, Laurentius Tinambunan, 2023).

Nilai Keadilan

Nilai Keadilan diambil dari Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah nilai kelima dari Pancasila. Dalam nilai keadilan memiliki makna yang terkandung bahwa nilai keadilan Nilai tersebut mendorong kita untuk saling menolong dan bekerja sama sesama manusia seperti dalam sikap kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karena itu, Nilai keadilan menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya mendapatkan perlakuan secara adil tanpa membedakan (Qisthi et al., 2024). Dengan demikian, kita belajar untuk bersikap adil menunjukkan kepedulian terhadap sesama individu, memelihara proporsionalitas antara kewajiban yang diemban dengan hak yang dimiliki, serta menghargai hak-hak individu lainnya. Makna dari sila kelima ini sangat penting karena bertujuan memastikan pembangunan dan kesejahteraan dirasakan oleh siapa pun, tanpa memperhatikan latar belakangnya.

Dalam pemikiran Bung Hatta, Bung Hatta memandang Pancasila sebagai ideologi bukan hanya pemikiran teori atau doktrin kaku, akan tetapi sebagai pedoman hidup bagi seluruh bangsa. Ideologi berfungsi sebagai landasan untuk mempersatukan masyarakat yang beragam dan memberikan arah dalam pembangunan bangsa. Dalam pandangannya, Pancasila sebagai ideologi yang dinamis, yang mencerminkan nilai-nilai luhur serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Perspektif Bung Hatta tentang Pancasila sebagai Ideologi Dinamis

Pandangan Bung Hatta menempatkan Pancasila sebagai nilai hidup yang tidak statis, melainkan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Pancasila adalah pedoman moral dan fondasi rohani untuk seluruh tata kehidupan dalam tindakan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan. Dalam nilai Pancasila seperti Nilai Ketuhanan, Nilai kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, dan Nilai Keadilan bukan hanya sekadar slogan, tetapi harus dijalankan secara nyata dan terus disesuaikan dengan konteks zaman. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber inspirasi dan kekuatan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu (Hasan et al., 2024).

Pandangan tersebut menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya warisan sejarah atau dokumen formal negara, tetapi juga landasan hidup yang harus dihayati dan dipraktekkan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Setiap periode generasi memiliki kewajiban untuk menafsirkan hal tersebut untuk menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai tantangan zamannya tanpa menghilangkan makna dasarnya. Dalam konteks modern, misalnya, nilai kemanusiaan dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, sementara nilai keadilan sosial dapat diterapkan dengan memperjuangkan pemerataan ekonomi dan peluang yang sama bagi bangsa Indonesia. Dengan cara ini, Pancasila tetap relevan dan menjadi kompas moral cara mempertahankan jati diri bangsa di bawah pengaruh gelombang dunia dan perubahan sosial yang cepat.

Pancasila berperan sebagai fondasi utama (dasar) yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedudukan Pancasila tidak terbatas pada sekadar pemikiran filosofis atau dasar negara semata, tetapi juga meluas menjadi ideologi bangsa. Sebagai sebuah kerangka berpikir, Pancasila selalu membutuhkan adaptasi dan pengembangan diri secara berkala, memastikan nilainya tetap relevan seiring dengan segala perkembangan zaman yang terjadi (Wiyono, 2021). Oleh karena itu, penerapan Pancasila tidak berhenti pada ranah individual, tetapi harus tercermin secara konsisten dalam setiap kebijakan publik dan regulasi negara, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan dan martabat seluruh warga negara.

Pancasila digunakan sebagai landasan pemerintahan negara sebagai dasar. Dalam hal ini, Pancasila adalah ideologi, bukan hanya dasar negara dan filosofi. Pancasila juga adalah kerangka berpikir yang selalu memerlukan penyempurnaan agar dapat tetap berkembang dan mempertahankan nilainya sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila diklasifikasikan sebagai ideologi yang fleksibel (terbuka), yang mengimplikasikan bahwa esensi nilai-nilai fundamentalnya tetap konstan. Namun, nilai-nilai tersebut dapat dikembangkan menjadi nilai instrumental yang berevolusi dan berubah sejalan dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat.

Pancasila memiliki tiga tingkatan hierarki dalam tatanan nilainya untuk mengakomodasi fleksibilitas tersebut:

1. Nilai Dasar

Nilai dasar yaitu esensi yang berkarakter permanen dan tidak dapat termodifikasi. Nilai Instrumental dan Nilai Praksis dijabarkan lebih lanjut dari nilai dasar, sebagaimana telah termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai ini mencakup prinsip-prinsip utama seperti keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan permusyawaratan.

2. Nilai Instrumental

Nilai Instrumental merupakan derivasi operasional dari Nilai Dasar, yang terwujud dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004.

3. Nilai Praksis

Nilai Praksis (atau Praktis) adalah aktualisasi lanjutan dari Nilai Dasar dan Nilai Instrumental. Perwujudan nilai ini harus selaras dan tidak boleh menyimpang dari koridor nilai-nilai di atasnya. Contoh aplikasinya: Sila ke-3 menuntut agar masyarakat senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan nasional di Indonesia.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memahami, mengimplementasikan, dan mencintai nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara. Sebagaimana kita menghargai betapa pentingnya diri kita, Pancasila juga memiliki peranan yang amat krusial bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila disebut sebagai filsafat negara karena memuat landasan filosofis pendirian negara dan menuntut bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia wajib bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merangkum unsur-unsur penting, yaitu nilai-nilai yang berasal dari agama, budaya, serta adat istiadat (Selvi Putri, 2021).

Selain fungsi-fungsi mendasar tersebut, Pancasila juga memiliki karakteristik penting sebagai ideologi terbuka yaitu fleksibilitas Ideologi Pancasila yang terlihat di aplikasinya, dapat menampilkan *mindset* konseptual dan dinamis dalam menghadapi era modern. Keterbukaan ini mencakup tiga tingkatan nilai: nilai dasar yang memiliki esensinya yang tetap, lalu nilai instrumental yang bertindak sebagai alat implementasi nilai dasar dan dapat mengadaptasikan dengan kondisi zaman, serta nilai praksis sebagai manifestasi nyata dari pelaksanaan ideologi tersebut. Ideologi Pancasila memiliki sifat yang selalu relevan (aktual), berkembang (dinamis), dan visioner (antisipatif), memungkinkannya untuk beradaptasi secara berkelanjutan dengan perubahan zaman, kemajuan ilmu dan teknologi, serta gejolak aspirasi yang muncul di tengah masyarakat (Irawan et al., 2023).

Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila pertama dalam Pancasila, menurut Mohammad Hatta, merupakan prinsip spiritual yang membimbing cita-cita kenegaraan Indonesia. Prinsip spiritual ini memberikan bimbingan kepada setiap orang, serta kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Prinsip dasar ini mendorong sila pertama menjadi sila kedua, yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Begitu juga dengan sila ketiga dan keempat. Namun, tujuan terakhir (ghoyah) Pancasila adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila kelima. (Hatta, 1960, p. 7).

Menurut Mohammad Hatta, dengan memegang erat filsafat ini, Pemerintah Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jalur yang benar demi menjamin keselamatan negara dan masyarakat, ketenteraman global, serta persaudaraan antarnegara. Penetapan sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada posisi pertama memberikan negara basis moral yang sangat kuat (Wanti, 2017). Dapat disimpulkan bahwa pancasila adalah satu kesatuan nilai, bukan hanya lima sila yang berdiri sendiri serta memungkinkan interpretasi yang selaras dengan perkembangan zaman tanpa merusak pondasi moral dan politiknya.

Beberapa tahun menjelang wafatnya, Mohammad Hatta menyuarkan peringatan keras: aplikasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas ucapan. Beliau menyoroti bahwa hanya segelintir warga negara Indonesia yang benar-benar menjadikan Pancasila sebagai keyakinan mendalam yang berakar di hati mereka. Hatta mengingatkan bahwa kelima prinsip dasar itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Beliau menekankan bahwa sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, harus menjadi panduan yang mengikat seluruh sila lainnya (Hatta, 1977, p. 20).

Sebagai prinsip pemersatu bangsa, Pancasila menganut prinsip negara kesatuan yang meliputi (Salomo & Sophian, 2017):

1. Melindungi semua warga negara dan mencakup setiap suku bangsa yang ada di Indonesia.
2. Mengatasi segala pemahaman paham individual yang diusung oleh negara.
3. Menjaga seluruh wilayah teritorial (tumpah darah), sehingga membentuk nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pandangan Moh. Hatta, Pancasila didasarkan pada dua fondasi utama: moralitas dan politik. Beliau menyebut fondasi politik Pancasila mencakup Sila Kemanusiaan, Sila Persatuan, Sila Kerakyatan (Demokrasi), dan Sila Keadilan Sosial. Dengan fondasi moral yang kokoh, negara diharapkan memiliki dasar yang kuat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kebenaran, kebaikan, keadilan, dan persaudaraan, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Hatta meyakini bahwa politik pemerintahan yang berlandaskan moralitas kuat akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi rakyat. (Hatta, 1966: 30-31).

Dari semua pernyataan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan filosofi dasar negara dan bangsa Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip universal. Aspek keuniversalan Pancasila ini sangat esensial sebab ia bertindak sebagai pemersatu sekaligus solusi jalan tengah bagi populasi Indonesia yang sangat majemuk (plural). Pancasila sebagai pemersatu bangsa berarti bahwa itu mengandung tujuan bagi bangsa dan negara untuk mencapai sila kelima, sehingga menjadi alat untuk mencapainya. Cita-cita negara ini mampu menyatukan semua bagian bangsa. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang dapat membantu mengintegrasikan bangsa dan mengajarkan cara mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin dalam kehidupan masyarakat yang berBhineka Tunggal Ika (Rizkianto et al., 2024).

Oleh karena itu Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi dan dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapat Bung Hatta bahwa Pancasila memuat dua inti dasar: landasan moral yang bersumber dari etika keagamaan (Sila Pertama) dan landasan kebijakan kenegaraan (Sila Kedua hingga Kelima). Secara keseluruhan, setiap prinsip dalam Pancasila memuat kaidah normatif yang berperan sebagai pedoman bagi warga negara dalam melaksanakan hak serta menunaikan kewajiban mereka (Fuady, 2019). Pancasila mengajarkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan sebagai pedoman moral.

Negara Indonesia digerakkan oleh nilai-nilai Ketuhanan untuk menjunjung tinggi kepercayaan dan toleransi sesama umat beragama. Warga negara didik oleh Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab demi menghormati martabat dan hak-hak dasar manusia, setiap orang harus diperlakukan dengan setara dan penuh keadilan. Semangat kebangsaan dan solidaritas sosial diperkuat oleh sila ketiga persatuan Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan menunjukkan Pancasila sebagai landasan untuk penerapan pemerintahan dan pelaksanaan demokrasi untuk konteks etika bernegara. Sila ini menekankan penghormatan terhadap suara rakyat dan Keputusan yang diambil mesti didasarkan pada semangat musyawarah agar dapat mencapai perwujudan dari keadilan yang merata bagi semua masyarakat Indonesia untuk membutuhkan perlakuan sosial-ekonomi dan kesejahteraan yang adil.

Bung Hatta menekankan bahwa penghayatan dan pengamalan Pancasila harus menjadi bagian integral dari seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara agar Pancasila dapat berfungsi sebagai ideologi yang terus berkembang. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam pendidikan, kebijakan publik, dan setiap aspek masyarakat sosial dan politik. Metode ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi simbol formal, sekaligus berperan sebagai kekuatan nyata dapat mengarahkan tindakan dan keputusan untuk mencapai tujuan nasional.

Dari konsep pemikiran Bung Hatta meyakini bahwa Pancasila harus mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan hakekatnya dalam konteks perkembangan global dan perubahan sosial yang cepat. Sebagai ideologi dinamis, Pancasila memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan nilai-nilai dasar dan tetap terbuka untuk inovasi dan transformasi yang konstruktif. Dengan demikian, Pancasila menjadi instrumen penting dalam Memelihara keutuhan dan solidaritas nasional, di samping

itu menciptakan keadilan bagi seluruh bangsa di tengah dinamika kehidupan modern. Pancasila berfungsi sebagai benteng kultural yang memungkinkan Indonesia berinteraksi dengan dunia tanpa terpengaruh oleh nilai-nilai asing yang bertentangan. Pada saat yang sama, itu menegaskan jati diri keindonesiaan yang berbasis moral dan etika luhur. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai alat penting untuk mempertahankan Keselarasan dan kebersatuan beserta mewujudkan keadilan sosial dalam dinamika kehidupan zaman sekarang.

Kesimpulan dan Saran

Mohammad Hatta memandang Pancasila sebagai Ideologi Dinamis yang berfungsi fundamental sebagai prinsip dasar negara sekaligus panduan hidup masyarakat Indonesia Hatta secara tegas membagi Pancasila menjadi dua fondasi utama yang saling mengikat: Fondasi Moral, yang bersumber dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Fondasi Politik mencakup empat sila berikutnya (Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Sosial). Pembagian ini menegaskan bahwa segala kebijakan dan tindakan politik harus selalu diarahkan dan dibimbing oleh nilai-nilai etika dan moral yang luhur, menjadikan negara memiliki landasan yang kokoh untuk mencapai kebaikan, kebenaran, dan keadilan.

Sesuai dengan pandangan Hatta, sifat dinamis Pancasila adalah kuncinya. Pancasila diklasifikasikan sebagai ideologi yang terbuka, fleksibel, dan dapat beradaptasi seiring dengan kemajuan zaman, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat dan harapan masyarakat, tanpa harus kehilangan Nilai Dasar utamanya. Keterbukaan ini memungkinkan nilai-nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam bentuk nilai-nilai instrumental yang berubah-ubah sesuai kebutuhan, dan kemudian diwujudkan dalam Nilai Praksis (pelaksanaan nyata). Dengan struktur nilai yang berjenjang ini, Pancasila mampu tetap aktual, antisipatif, dan relevan sebagai kerangka berpikir bangsa di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat.

Pada akhirnya, Pancasila berfungsi sebagai alat penting untuk menyatukan bangsa dalam masyarakat yang sangat pluralistik, karena ia menjadi jalan tengah dan cita-cita bersama bagi berbagai suku, ras, dan budaya. Pancasila memuat tujuan dan prinsip negara, terutama dalam mewujudkan Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan keyakinan ini memiliki kekuatan untuk menyatukan semua aspek bangsa menjadi satu kesatuan yang kuat, membantu mereka mencapai kemakmuran dan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila berfungsi sebagai lebih dari sekadar ideologi dan dasar negara; itu menjadi prinsip moral utama dalam kehidupan nasional. Kesimpulannya ini bahwa Pancasila adalah falsafah yang masih hidup dan harus terus dikembangkan. Ini berarti bahwa seluruh warga negara dan penyelenggara negara harus menghayati dan mematuhi secara menyeluruh agar tetap menjadi kompas moral dan politik yang berguna untuk mempertahankan persatuan dan kesejahteraan nasional.

Daftar Pustaka

- Alfarizi, S. (2020). *Mohammad Hatta: Biografi Singkat 1902-1980*.
- Ananda Rivaldo Pondiu Unggul, Dewanda Tisna Ajati, R. W. S., & Fitriono, R. A. (2022). PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *INTELEKTIVA*, 1(Pancasila), 26–27. <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/>
- Awalia Marwah Suhandi, D. A. D. (2021). *Implementasi nilai pancasila terhadap esensi nilai humanisme dalam kehidupan bermasyarakat di kalangan generasi muda*. 3(1), 36–43.
- Fitri Lintang Sari, F. U. N. (2022). *NILAI-NILAI SILA PERSATUAN INDONESIA DALAM KEBERAGAMAN KEBUDAYAAN INDONESIA*. 1.
- Fuady, A. S. (2019). Pancasila Perspektif Mohammad Hatta sebagai Dasar Pendidikan Islam di Indonesia. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 731–739.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Putri, A. (2024). Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138–150.

- Heri santoso, D. (2019). *SIMPOSIUM NASIONAL FILSAFAT NUSANTARA EKSPLORASI KEKAYAAN FILSAFAT DAN KEARIFAN LOKAL NUSANTARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU*.
- Irawan, A. D., Adibah, L. N., Infans, D., & Toniek, V. (2023). *Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan Dalam Perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti menjadi cita-cita Rakyat Nomor 7 Tahun 2001* ., 3(April), 11–21.
- Jedra Sudirman, A. S. (2021). *PENERAPAN NILAI NILAI PANCASILA SILA PERTAMA TERHADAP KEHIDUPAN BERAGAMA Jedra*. 6(2), 284–291.
- Osbin Samosir, Laurentius Tinambunan, R. S. (2023). *KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN Tinjauan Filosofis atas Demokrasi dari Sila IV Pancasila Osbin*. 53–63.
- Qisthi, A. S., Arizky, B., Saputri, D., & Zakariya, A. A. (2024). *Memahami Sila-Sila dalam Pancasila menurut Pandangan Pendidikan Agama Islam*. 2(1). <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i1.358>
- Rizkianto, A., Al-Hadid, S., & Surabaya, I. (2024). *Kajian Filosofis: Pancasila dan Altruisme*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 24–38. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5970>
- Salomo, C. S., & Sophian. (2017). *Pancasila sebagai pemersatu bangsa negara Indonesia*. 1(2), 167. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2676>
- Savitri, A. S., & Dewi, D. A. (2021). *Inventa : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendahuluan*. V(2), 165–177.
- Selvi Putri, N. (2021). *Sumber Politis Pancasila Sebagai Ideologi Negara*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Soeprapto, S. (2013). *Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila*. *Jurnal Filsafat*, 23(2), 99–116.
- Teuku Muharam Rizqullah, F. U. N. (2022). *Pegimplementasian ideologi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. 6(2), 2630–2633.
- ujang jamaludi, reksa adya pribadi, siti sarni. (2023). *IMPLEMENTASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN IPA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA*. 09, 3247–3256.
- Wanti, D. D. (2017). *PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI*. <http://arynatalina.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/66057/Bab+1.pptx>
- Wiyono, S. (2021). *EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SEBAGAI PANDUAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA*. *Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Volume*. 15, 37–52.
- Zubadi, A. (2020). *ANALISIS AKSIOLOGIS TERHADAP PEMIKIRAN BUNG HATTA TENTANG PANCASILA*. In *LABORAATORIUM FILSAFAT NUSANTARA FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA* (Vol. 1, Issue 1). <https://lafinus.filsafat.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/734/2022/05/SNFN-2021-LAFINUS-UGM-compressed.pdf#page=9>